

**METAFORA DALAM BERITA PRODUK CINA PADA SURAT KABAR
MEDIA INDONESIA DAN KOMPAS: ANALISIS WACANA KRITIS**
*(Metaphors in the China's News Products in Media Indonesia and Kompas
Newspapers: Critical Discourse Analysis)*

Winci Firdaus

Balai Bahasa Provinsi Banda Aceh

Jalan Panglima Nyak Makam 21 Lampineung, Banda Aceh

Telepon (0651) 7551096, Faksimile (0651) 7551687 Pos-el: wincifirdaus@yahoo.com

Diterima: 7 Juli 2013; Direvisi: 28 September 2013; Disetujui: 10 November 2013

Abstract

Referring to its substance, Indonesian mass media tends to assume that the economic failure of Indonesia is only considered from one side, it is due to the influx of imported goods from China. While, other sides such as the Indonesian government's readiness of it, the potential of Indonesian human resources, and even maximization the existing natural resources seem untouched by the media. For the unequal news release, it can be presumed that the media has channeled a certain ideology to its readers. The ideology triggers negative attitudes towards Chinese products. Each language choice raises certain associations referred to reality. Thus, every language applied in the text is criticized by applying Critical Discourse Analysis (CDA) theory, it will reflect the ideological role in creating a group identity through language use.

Keywords: *metaphor, Chinese products, critical discourse analysis*

Abstrak

Dilihat dari sisi berita media di Indonesia cenderung beranggapan bahwa kegagalan perekonomian di Indonesia hanya dilihat dari satu sudut saja yaitu karena masuknya barang impor dari Cina, media kurang *mengekspose* bagaimana kesiapan pemerintah RI, potensi sumber daya manusia yang dimiliki, bahkan bagaimana pengoptimalan sumber daya alam yang kita miliki sepertinya tidak tersentuh oleh media. Dengan pemberitaan yang tidak berimbang, maka dapat diduga bahwa media telah menyalurkan suatu ideologi tertentu kepada pembacanya. Ideologi inilah yang memicu sikap negatif terhadap produk-produk dari Cina. Setiap pilihan bahasa menimbulkan asosiasi tertentu pada realitas yang diacu. Dengan demikian, apabila setiap bahasa pada teks dikritisi dengan menerapkan teori *Critical Discourse Analysis (CDA)* akan tercermin bagaimana ideologi berperan dalam mewujudkan identitas suatu kelompok melalui penggunaan bahasa.

Kata kunci: *metafora, produk Cina, analisis wacana kritis*

PENDAHULUAN

Pada awalnya perdagangan bebas di kawasan Asia menjadi cita-cita yang harus didukung oleh negara-negara di Asia, bahkan ada harapan bahwa perdagangan bebas di kawasan Asia menjadi pendongkrak meningkatnya perbaikan ekonomi bagi negara-negara di kawasan Asia pada umumnya. Sebagai tindak lanjut dari usaha tersebut

maka dilakukanlah perundingan antarnegara dan lahirilah *Free Trade Agreement (FTA)*.

Dengan adanya FTA tersebut, 90 persen produk Cina dan ASEAN akan menikmati tarif nol persen. FTA Cina dan ASEAN merupakan FTA terbesar yang pernah ada. Total populasi yang dilingkupi FTA tersebut mencapai 1,9 miliar orang. Cina telah menjadi mitra dagang ketiga terbesar

ASEAN dengan total nilai perdagangan sebesar 230 miliar dollar AS pada tahun 2008. Tidak ada yang meragukan kemampuan ekonomi Cina. Negara yang memiliki sejarah lebih dari 5000 tahun itu baru membuka diri terhadap ekonomi propasar 30 tahun lalu. Cina baru bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 2001. Cina telah menandatangani FTA dengan Chile (2005), Pakistan (2006), Selandia Baru (2008), dan Peru (2009). Dalam waktu yang terhitung singkat itu juga terlihat banyak sekali perubahan dan perbaikan terutama perdagangan. Pada akhir tahun 2009, mereka telah mengalahkan Jerman sebagai negara pengekspor terbesar di dunia.

Pemberlakuan *Asean China Free Trade Agreement* (ACFTA), yang telah berlangsung lebih dari satu tahun ini membuat sejumlah industri tidak mampu memproduksi secara maksimal sesuai dengan kapasitasnya. Cina menjadi negara yang paling banyak mendapat keuntungan dari banjir produk mereka di negara-negara ASEAN. Kondisi ini terjadi karena Cina diyakini menetapkan harga barang ekspor lebih murah dari yang dijual di dalam negeri (*dumping*).

Faktor lainnya yaitu Cina lebih awal memulai *Free Trade Agreement* (FTA) dan perjanjian lainnya yang membuat Negeri Tirai Bambu tersebut mengalami kemajuan yang pesat dalam perdagangan dunia. Tidak hanya itu. Melalui sumber daya alam yang dimiliki menjadikan kesiapan Cina dalam *mensupport* industri hilirisasi. Cina juga sudah memulai program kebijakan standardisasi industri sejak lima tahun lalu padahal RI masih belum. Lemahnya daya saing industri nasional sebagai salah satu penyebab kalah bersaingnya produk Indonesia dibandingkan dengan produk-produk Cina. Tak heran jika implementasi ACFTA selama ini dinilai lebih banyak mendatangkan manfaat bagi Cina. Sementara bagi Indonesia, implementasi ACFTA justru membuat pelaku sektor industri dalam negeri terpukul karena kalah bersaing dengan produk-produk murah asal Cina.

ACFTA dipandang sebagai ancaman dengan berbagai alasan. ACFTA, di antaranya, berpotensi membangkrutkan banyak perusahaan

dalam negeri. Bangkrutnya perusahaan dalam negeri merupakan imbas dari membanjirnya produk Cina yang ditakutkan dan memang sudah terbukti memiliki harga lebih murah. Selain itu, murahanya barang impor dari Cina juga berpotensi besar mengikis devisa kita karena jumlah impor barang konsumsi semakin tinggi. Hal ini juga bisa berakibat pada semakin lemahnya nilai tukar mata uang kita karena digunakan untuk biaya impor barang-barang konsumsi tersebut.

Media banyak mengulas sisi negatif ACFTA, sisi positif dari ACTFA jarang sekali diungkap, media memberikan *statement* bahwa masuknya barang dari Cina menimbulkan efek perekonomian di Indonesia menjadi hancur, banyak perusahaan gulung tikar, dan produksi dalam negeri menjadi terpasung dengan adanya produk dari Cina. Yang menjadi pertanyaan kenapa harus produk dari Cina yang selalu disalahkan? Kenapa hanya produk Cina yang diungkapkan secara panjang lebar, bagaimana dengan barang impor dari negara lain? Bagaimana dengan potensi sumber daya manusia dalam negeri apakah sudah bisa dikatakan memadai atau siap bersaing dengan dunia luar?

Sepertinya media melihat kegagalan perekonomian di Indonesia hanya dari satu sudut saja yaitu karena masuknya barang impor dari Cina, media kurang *mengekspose* bagaimana kesiapan pemerintah RI, potensi sumber daya manusia yang dimiliki, bahkan bagaimana pengoptimalan sumber daya alam yang kita miliki sepertinya tidak tersentuh oleh media.

Dengan pemberitaan yang tidak berimbang, maka dapat diduga bahwa media telah menyalurkan suatu ideologi tertentu kepada pembacanya, Ideologi inilah yang memicu sikap negatif terhadap produk-produk dari Cina.

Menurut Fairclough (2003:1), setiap teks mempunyai efek sosial. Karenanya, setiap pilihan bahasa menimbulkan asosiasi tertentu pada realitas yang diacu. Dengan demikian, apabila setiap bahasa pada teks dikritisi dengan menerapkan teori *Critical Discourse Analysis* (CDA) akan tercermin bagaimana ideologi berperan dalam mewujudkan identitas suatu

kelompok melalui penggunaan bahasa.

Kajian ini akan melihat bagaimana bahasa khususnya dalam metafora yang digunakan dalam pemberitaan “Produk Cina”, ideologi apa yang disalurkan oleh media, bagaimana penghasilan, penggunaan dan penyebaran wacana tersebut, serta melihat praktik sosial apa yang disembunyikan oleh media melalui wacana.

KERANGKA TEORI

Dewasa ini bahasa bukan hanya sekadar media utama dalam berkomunikasi. Fairclough (1989, 2—4) menyatakan bahwa dalam masyarakat modern, pelaksanaan kuasa semakin meningkat dicapai melalui ideologi yang secara khusus dilakukan melalui perantaraan bahasa. Titik fokus perhatian Fairclough adalah melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan. Untuk melihat bagaimana pemakai bahasa membawa nilai ideologi tertentu, diperlukan analisis yang menyeluruh karena bahasa secara sosial dan historis adalah bentuk tindakan dalam hubungan dialektik dengan struktur sosial (Fairclough: 2003, 2—3). Oleh karena itu, Fairclough menganggap bahwa kajian bahasa tidak lagi seharusnya difokuskan hanya pada kajian-kajian struktur yang melepaskan bahasa dari dunia sosialnya. Kajian bahasa harus mulai ditingkatkan/dilanjutkan pada kajian-kajian yang bersifat memahami proses sosial (*social process*) yang terdapat di dalam bahasa, seperti dominasi, hegemoni, ideologi, dll. yang diperjuangkan, dilangsungkan, disalurkan, dipertahankan, bahkan diinstitusikan.

Berikut gambaran teori tiga dimensi Fairclough.

Analisis tekstual dalam kajian ini hanya dibatasi pada metafora. Bagi sebagian orang penggunaan metafora dalam interaksi dan komunikasi sehari-hari boleh jadi hanya merupakan bagian dari gaya berbahasa sehingga fungsinya hanya sebagai variasi retorik. Pembicara akan menggunakan suatu ekspresi figuratif ketika dirasakannya tidak ada bahasa literal yang mampu menghasilkan efek yang sama atau tidak ada bahasa literal yang sepadan dengan bahasa figuratif untuk menyampaikan makna yang diinginkan sehingga memperoleh respon yang sama.



Gambar 1: Analisis Wacana Tiga Dimensi Model Norman Fairclough

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, peneliti mengumpulkan berbagai teks berita-berita tentang produk Cina dari harian *Media Indonesia* dan *Kompas* dan dilakukan pengklasifikasian. Teks-teks tersebut dipilah berdasarkan parameter waktu dan topik. Data ini diambil pada rentang waktu tahun 2010 s.d. 2011, dengan beberapa alasan yaitu: 1) pada tahun 2010 adalah awal mula diberlakukannya ACFTA; dan 2) pada rentang waktu tahun 2010 s.d. 2011 produk Cina mulai banyak ditemukan di Indonesia dan bersaing secara langsung dengan produk Indonesia. Kedua, dilakukan triangulasi data dengan teknik banding, sesuai dengan identifikasi

masalah, dalam penelitian ini akan diteliti teks-teks yaitu berita-berita dari *Media Indonesia* dan *Kompas* yang berkaitan dengan topik 'produk Cina'. Pada triangulasi ini dilakukan pemisahan dengan teknik tandai, pilah, dan salin. Pada tahap ketiga, data yang mengandung metafora tentang 'produk Cina' penulis pisahkan dengan teknik salin dan akan dijadikan data untuk memasuki tahapan berikutnya yaitu analisis data.

Pada tahap analisis data, yang digunakan adalah analisis wacana media pendekatan Norman Fairclough yang dikenal dengan kaidah analisis wacana tiga dimensi. Yaitu: (1) teks (*textual*), (2) praktik kewacanaan yang melibatkan pemroduksian dan pengonsumsian teks, dan (3) praktik sosial (*socialcultural practice*). (Fairclough dalam Phillips and Marianne, 2002:68).

PEMBAHASAN

Analisis Tekstual

Berdasarkan data yang diperoleh, metafora yang digunakan dalam berita "Produk Cina", lebih banyak pengungkapan metafora yang bersifat negatif, artinya metafora dibuat oleh media dengan upaya untuk menyudutkan salah satu pihak saja yaitu Cina. Dari metafora yang diungkapkan sebagaimana besar menyatakan bahwa Indonesia menjadi korban dan Cina mendapatkan keuntungan yang besar. Berikut data metafora yang didapat dari Media Indonesia yaitu:

A. Metafora Nominatif

- (1) *Istana* tidak Intervensi Pembelian Pesawat MA-60 (MI.11052011)
istana (vehicle),
Rumah kediaman resmi kepala negara dan keluarganya (*topic*)
Pemerintah atau eksekutif yang memberikan kebijakan (*ground*)
- (2) Produk Cina Masuk, Produk Lokal "Mati" (03012010) *mati (vehicle)*
Hilangnya nyawa pada makhluk bernyawa (*topic*)
Bangkrut, kalah bersaing (*ground*)
- (3) *Rontoknya* Industri Nasional (MI.28012011)

rontok (vehicle)

Jatuh atau gugur biasanya dikaitkan dengan buah-buahan atau tanaman (*topic*)
Hancur, kalah bersaing, porak poranda (*ground*)

B. Metafora Predikatif

- (4) Berlakukan Dumping, Cina *Dominasi* ACFTA (MI.24032011)
dominasi (vehicle)
Penguasaan oleh pihak yang lebih kuat (*topic*)
Penguasaan pada bidang ekonomi dengan cara *dumping* (menurunkan harga dibawah standar) / persaingan yang tidak sehat (*ground*)
- (5) ACFTA *Pasung* Kapasitas Produksi Dalam Negeri (MI.25032011)
pasung (vehicle)
Alat untuk menghukum orang, berbentuk kayu berlubang (*topic*)
Tidak memberikan kesempatan untuk berkembang pada produk dalam negeri (*ground*)
- (6) Pemerintah *Perketat* Verifikasi Produk Impor dari Cina (MI.14042011)
perketat (vehicle)
Erat melekat, sempit (*topic*)
Teliti, cermat, dengan membuat aturan – aturan yang tidak dipermudah (*ground*)
- (7) ACFTA *Kacaukan* Industri Dalam Negeri (MI.12052011)
kacaukan (vehicle)
Campur aduk (*topic*)
Mengobrak abrik bidang industri dalam negeri sehingga berdampak negatif (*ground*)
- (8) Mainan Impor Cina terus *Banjiri* Pasar RI (MI.19052011)
banjir (vehicle)
Berair banyak dan deras kadang-kadang meluap (*topic*)
Memenuhi atau memonopoli pasar dengan mainan dari Cina (sebagian mainan berasal dari Cina) (*ground*)

- (9) UMKM Akan Makin *Tergilas* akibat FTA (30122010)
tergilas (vehicle)
Terlindas (topic)
Terlindas dan membuat tak berdaya akibat adanya FTA (*ground*)
- (10) Produk Cina "*Bombardir*" Indonesia, Apa Kabar Produk Lokal? (09012010)
Bombardir (vehicle)
Pengeboman terus menerus (topic)
Banyaknya atau maraknya produk Cina di pasaran (*ground*)
- (11) Serunya *Berburu* Produk Cina di Tanah Abang (19012010)
Berburu (vehicle)
Mengejar atau mencari binatang di hutan (*topic*)
Mencari produk Cina di pasar biasanya dilihat dari harga dan spesifikasi barang yang diperlukan (*ground*)
- (12) Sebelum ACFTA Berlaku, Ponsel Cina Sudah *Menjamur* (22012010)
Menjamur (vehicle)
Menjadi berjamur (topic)
Tumbuh subur dan semakin banyak bahkan tidak terkendali (*ground*)
- (13) Hipmi: Pemerintah *Tak Matang* Hadapi ACFTA (29012010)
tak matang (vehicle)
Tidak matang (topic)
Tidak ada kesiapan dari pemerintah untuk menghadapi ACFTA, cenderung bertindak setengah-setengah (*ground*)
- (14) Produk Cina Mulai *Banjiri* Indonesia (02022010)
Banjir (vehicle)
Berair banyak dan deras kadang-kadang meluap (*topic*)
Memenuhi atau memonopoli pasar dengan mainan dari Cina (sebagian mainan berasal dari Cina) (*ground*)
- (15) FTA Membuat Kita *Terbirit-birit* (19122010)
terbirit-birit (vehicle)
Lari tunggang langgang (topic)
Kalah bersaing, tidak berdaya, tidak bisa

berbuat banyak sehingga jalan yang diambil adalah memberikan hal itu terus terjadi tanpa ada solusi (*ground*)

Analisis Praktik Kewacanaan

Hasil analisis terhadap proses penghasilan berita dalam *Media Indonesia* dan *Kompas* menunjukkan bahwa secara umum berita yang dihasilkan kedua media dihasilkan secara mandiri oleh individu tertentu, tetapi merupakan hasil kerja kolektif dalam rantai institusional yang boleh dipengaruhi oleh ideologi dan kepentingan media itu sendiri.

A. Sejarah Media Indonesia

Media Indonesia pertama kali diterbitkan pada tanggal 19 January 1970. Sebagai surat kabar umum pada masa itu. Dengan kesadaran untuk terus maju, pada tahun 1988 Teuku Yousli Syah selaku *pendiri* Media Indonesia bergandeng tangan dengan *Surya Paloh*, mantan pimpinan Surat Kabar Prioritas. Dengan kerjasama ini, dua kekuatan bersatu: *kekuatan pengalaman* bergandeng dengan *kekuatan modal dan semangat*. Maka pada tahun tersebut lahirlah Media Indonesia dengan manajemen baru dibawah PT. Citra Media Nusa Purnama. *Surya Paloh* sebagai Direktur Utama sedangkan Teuku Yousli Syah sebagai *Pemimpin Umum*, dan *Pemimpin Perusahaan* dipegang oleh Lestary Luhur. Sejarah panjang serta motto "Pembawa Suara Rakyat" yang dimiliki oleh Media Indonesia bukan menjadi motto kosong dan sia-sia, tetapi menjadi spirit pegangan sampai kapan pun. *Surya Paloh* pada masa Orde Baru merupakan kader Partai Golkar, kemudian di masa reformasi beliau menjadi ketua umum Partai Nasional Demokrat. Nasional Demokrat merupakan partai yang mengusung ideologi nasionalis dan kerakyatan. Sehingga dampaknya tidak sejalan dengan ekonomi kapitalis komunis yang diusung oleh Cina.

B. Sejarah Kompas

Kompas Gramedia sebagai salah satu perusahaan yang terkemuka di Indonesia memiliki peristiwa peristiwa penting yang

menjadi tonggak perjalanan perusahaan dari sejak berdiri sampai perkembangannya saat ini. Terbitnya majalah bulanan *Intisari* pada tanggal 17 Agustus 1963 oleh Petrus Kanisius (PK) Ojong dan Jakob Oetama (JO), bersama J. Adisubrata dan Irawati SH. Majalah bulanan *Intisari* bertujuan memberikan bacaan untuk membuka cakrawala bagi masyarakat Indonesia. Hampir 3 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 28 Juni 1965, diterbitkan Surat Kabar KOMPAS, yang berawal dari ide menerbitkan koran untuk *melawan pers komunis*. Pada tahun 1960-an merupakan masa pergolakan ideologi antara komunis dan nasionalis. Pada masa itu orang Cina terbagi menjadi dua kelompok ada yang pro nasionalis dan ada juga yang pro komunis. Ojong dan Jakob Oetama merupakan aktivis yang bergerak melawan ideologi komunis.

C. Profil Pembaca Media Indonesia dan Kompas

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh lembaga intern Media Indonesia, dinyatakan bahwa pembaca kompas rata-rata Si (52%) dari total pembaca, usia pembaca dominan yaitu 25-34 tahun (45%), dan 52% pengakses atau pembaca adalah pegawai swasta.

Berdasarkan hasil survey lembaga penelitian intern Kompas membuktikan bahwa harian umum kompas memang lekat pada kalangan menengah dan kalangan intelektual di Indonesia.

Analisis Praktik Sosial

A. Beberapa Asumsi tentang Etnis Cina

Adanya sentimen anti-Cina yang bermuara pada kekerasan yang dilakukan terhadap etnis Cina di Indonesia tidak terlepas dari sentimen sosial dan kesenjangan ekonomi (Pattiradjawane, 2001: 250—253). Sentimen sosial berjalan seiring dengan masalah kesenjangan ekonomi. Di balik sentimen ini terdapat prasangka-prasangka yang terus menerus hidup dan bahkan sengaja dihidupkan dengan tujuan tertentu. Sebagai contoh pada zaman penjajahan Belanda, prasangka ini terkait dengan masalah politik. Etnis Cina distigmatisasi sebagai antek Belanda, dan prasangka ini terus bertahan

sampai masa awal kemerdekaan Indonesia. Terdapat penggeneralisasian sifat ini bagi semua warga Cina, padahal terdapat juga kalangan Cina yang bersimpati terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia.

Prasangka yang ada juga muncul akibat keunggulan kalangan Cina dalam memenangkan persaingan ekonomi. Keunggulan ekonomi warga etnis Cina memberikan dampak munculnya kecemburuan dan kebencian etnis lain yang pada akhirnya melahirkan prasangka-prasangka. Gambaran umum mengenai etnis Cina di Indonesia yang ada selama ini adalah stigma bahwa golongan Cina merupakan “binatang ekonomi” (*economic animal*) yang bersifat oportunistik, tidak memiliki loyalitas politik dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri (Kwartanada, 1996). Mitos-mitos tentang karakter-karakter orang Indonesia keturunan Cina sampai saat ini masih tertanam kuat dalam masyarakat kita, bahkan mungkin dalam kesadaran bangsa Indonesia keturunan Cina itu sendiri. Banyak tekanan terhadap warga negara etnis Cina yang berasal dari prasangka bahwa secara ekonomi mereka kuat, tidak loyal kepada Indonesia dan siap bermigrasi ke negara mana pun yang menawarkan keuntungan ekonomi kepada mereka.

B. Beberapa Kebijakan Pemerintah

a. Kebijakan Pemerintah Kolonial

Berabad-abad lamanya, orang-orang Cina dari berbagai propinsi sebelah tenggara Cina telah mulai pindah menetap di kepulauan Indonesia. Tekanan ekonomi dalam negeri Cina telah memaksa orang Cina merantau ke Asia Tenggara. Pada abad ke-18 VOC menarik orang Cina khususnya yang berada di Banten ke kota Batavia dengan suatu janji ada keuntungan ekonomi yang bisa diperoleh orang Cina dari kota dagang tersebut, dan memang tidak bisa dibantah bahwa orang Cina memperoleh keuntungan besar di daerah ini. Lambat laun kehadiran mereka bukan lagi sekedar penghuni kota tetapi sebagai saingan VOC. Untuk mengatasinya pada bulan Oktober 1740 pemerintah melakukan pembantaian orang-orang Cina di Batavia.

Selanjutnya Pemerintah Kolonial banyak mengeluarkan kebijakan yang membatasi gerak langkah orang-orang Cina di Hindia Belanda. Peraturan-peraturan pemerintah kolonial Belanda tersebut bersifat diskriminatif. Sejak bulan Nopember 1740 orang-orang Cina dikonsentrasikan dalam suatu permukiman tertentu yang disebut "Pecinan". Aturan yang disebut *Wijkenstelsel* tersebut dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang diundangkan dan diberlakukan kembali dari waktu ke waktu pada tahun 1835, 1854, 1866, dan 1871. Selain menerapkan *wijkenstelsel* VOC juga menerapkan *passenstelsel* atau surat jalan untuk menghambat gerak orang-orang Cina. Pada tahun 1870 keluar Undang-undang Agraria (*Agrarische Wet* 1870) yang melarang orang Cina memiliki tanah.

Dalam sistem kolonialisme yang memiliki *color-line* sebagai ciri universalnya, negara kolonial menggolongkan penduduk dalam tiga golongan penduduk berdasarkan ras untuk mengisolasi satu golongan dengan golongan yang lain, yaitu golongan Eropa di lapisan paling atas, golongan Timur Asing (Arab, Cina, dll) di lapisan kedua, dan penduduk bumiputera di lapisan ketiga. Penggolongan penduduk ini merupakan bagian dari politik pecah belah pemerintah kolonial, yang telah memperkuat perasaan segolongan. Kebijakan ini juga telah memunculkan perasaan rasialisme di kalangan pribumi.

Di bidang ekonomi pemerintah kolonial menempatkan etnis Cina dalam posisi dominan. Mereka dimanfaatkan sebagai perantara (*middlemen*) ekonomi atau yang biasa disebut sebagai pedagang perantara antara pihak Belanda dengan masyarakat pribumi. Posisi sebagai perantara ini semakin diperkuat dengan diperkenalkannya Sistem Tanam Paksa oleh pemerintah kolonial. Sejak awal mereka telah terlibat dalam kegiatan tanam paksa, misalnya dalam hal industri gula. Dalam hal pengolahan tebu menjadi gula dibutuhkan partisipasi pihak swasta yang biasanya melibatkan orang-orang Cina berdasarkan kontrak dari pemerintah. Belanda menggunakan orang-orang Cina untuk melancarkan roda eksploitasi kolonial melalui

peran mereka sebagai perantara dan pengawas.

Pemerintah kolonial telah mengkondisikan persaingan ekonomi secara tidak sehat antara penduduk bumiputera dengan orang-orang Cina, sehingga mereka beranggapan bahwa persaingan ekonomi ini harus disiasati dengan gerakan yang berbau rasialis. Menurut W.F. Wertheim, persaingan ekonomi merupakan akar ketegangan antara etnis Cina dengan Indonesia lokal. Konflik terjadi ketika pedagang santri Islam mulai bercita-cita untuk berperan dalam perdagangan yang semula dipandang rendah di kalangan santri Islam. Oleh karena itu kemudian didirikan Sarekat Dagang Islam yang tidak lepas dari semangat persaingan akibat berdirinya Kamar Dagang Tionghoa (Coppel, 1994:57).

b. Kebijakan Pemerintah Orde Lama

Pemerintah Indonesia yang dibentuk setelah penyerahan kedaulatan pada tahun 1950 pada dasarnya mewarisi kebijakan yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial. Pemerintah membiarkan warga Cina terus aktif di bidang ekonomi sambil membatasi keberadaan mereka sebagai pejabat di bidang birokrat. Namun warga Cina dibolehkan dalam bidang politik sehingga terdapat sebagian warga Cina yang menduduki jabatan sebagai menteri, misalnya Lie Kiat Teng sebagai Menteri Kesehatan dan Oey Tjoe Tat sebagai menteri pada kabinet 100 menteri.

Beberapa tokoh nasionalis di bawah Mr. Asaat pernah memperkenalkan sebuah program ekonomi yang disebut benteng, yang intinya ingin meningkatkan partisipasi ekonomi warga pribumi dalam ekonomi nasional (Suhandinata, 2009: 312). Sistem ini diberlakukan untuk melindungi para importir nasional agar dapat bersaing dengan asing yang masih beroperasi di Indonesia. Tujuan dari sistem benteng ini adalah agar terbentuk kelompok wiraswasta Indonesia yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Program ini memberikan hak kepada pengusaha pribumi untuk mendapatkan lisensi dan kredit impor. Sebenarnya pada pemerintahan Soekarno ini justru meminimalisir kebijakan ekonomi-politik sebagai pemicu segregasi sosial yang akan mengarah

pada munculnya sentimen anti-Cina. Tetapi target ini tidak tercapai dan hanya dimanfaatkan oleh sekelompok elit politik untuk menumpuk kekayaan pribadi atau menghimpun dana-dana politik, bahkan melahirkan sebuah bentuk kerjasama “Ali-Baba”. Dalam kerjasama model ini pihak Indonesia asli yang tidak berpengalaman menjual ijin dan lisensi kepada pedagang warga etnis Cina. Dengan cara ini orang Cina tetap mampu melanjutkan usahanya dan mendapatkan keuntungan, sementara mitra Indonesia asli hampir tidak mendapatkan pengalaman bisnis yang diperlukan bagi pengembangan ekonomi nasional.

Pada era pemerintahan demokrasi terpimpin, pemerintah juga mengeluarkan peraturan yang dianggap diskriminatif di bidang ekonomi yaitu PP no. 10/November 1959 yang melarang orang Cina berdagang di wilayah pedesaan yang melahirkan sejumlah insiden. Peraturan ini membatasi secara tegas peran dan hak ekonomi etnis Cina. Mereka hanya diperbolehkan berdagang sampai tingkat kabupaten dan tidak boleh berdagang di tingkat kecamatan apalagi di desa-desa. Implikasinya, orang-orang di berbagai daerah dilarang dan dipaksa untuk meninggalkan permukimannya di pedesaan. Sekalipun larangan ditujukan kepada WNA Cina totok, dalam prakteknya pembedaan dengan mereka yang peranakan tidak secara jelas diberlakukan. Selama tahun 1959-1960 kampanye pengusiran berlangsung dengan dukungan pihak TNI-AD. 136.000 orang Cina meninggalkan Indonesia, sementara 100.000 orang di antaranya pulang ke tanah leluhur Tiongkok (Mackie, 1976:82—85).

Kerusuhan anti-Cina tahun 1963 terjadi di berbagai daerah terutama di Jawa Barat yaitu di Cirebon, Bandung, Sumedang, Bogor, Cipayung, Tasikmalaya, Garut, Singaparna, dan Sukabumi. Selain itu kerusuhan juga terjadi di Solo, Surabaya, Malang, dan Medan. Kerusuhan terjadi akibat kesenjangan kemakmuran. Etnis Cina terkena imbas dari situasi politik-ekonomi saat itu, yaitu inflasi yang melonjak tinggi, kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok, frustrasi terhadap kebijakan ekonomi pemerintah Soekarno yang amburadul. Rasa frustrasi dengan

mudah dapat diarahkan dengan mencari target kemarahan yang termanifestasikan dalam kerusuhan anti-Cina, dan ini adalah bagian dari pertarungan memperebutkan kekuasaan politik antara kekuatan kiri dengan kanan.

c. Kebijakan Pemerintah Orde Baru

Pada era pemerintahan Soeharto, insiden anti-Cina terjadi di berbagai tempat meskipun tidak meluas secara serempak di banyak tempat. Kebijakan rezim Orde Baru terhadap warga Cina lebih sistematis dibandingkan kebijakan negara sebelumnya. Pemerintah berpendapat bahwa keterlibatan warga Cina dalam peristiwa September 1965 merupakan hasil dari tidak berasimilasinya warga Cina dalam masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah meluncurkan program asimilasi yang sangat gencar. Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 mengenai pelarangan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina yang menghalangi ekspresi kehidupan sehari-hari warga Cina. Proses marginalisasi dilakukan dengan cermat. Partisipasi politik dihambat dengan berbagai alasan, termasuk dalam bidang sosial budaya.

Pada era ini terdapat pengaruh keamanan dan Departemen Agama yang kadang-kadang ikut campur dalam pelaksanaan ibadah keagamaan khususnya pada bentuk-bentuk yang lebih Cina. Dulunya acara seperti Tahun Baru Imlek, Perayaan Rebutan, atau Festival Kapal Naga adalah acara umum yang menarik penonton dan bahkan pesertanya berasal dari semua komunitas dengan disertai arak-arakan, menebar hadiah, dan membuka arak-arakan besar. Selanjutnya acara keagamaan Cina hanya dilakukan di lingkungan kelenteng atau dalam kediaman keluarga. Selain alasan ketertiban umum, pemerintah berdalih bahwa perayaan seperti Tahun Baru Imlek bukanlah perayaan agama Buda dan oleh karenanya tidak ada alasan yang kuat (Suhandinata, 2009:135).

Etnis Cina kembali berkonsentrasi dalam bidang ekonomi. Bentuk ekonomi kerjasama atau ekonomi Ali-Baba pada tahun 1950-an kembali

muncul pada masa pemerintahan Soeharto. Praktek bisnis seperti ini dalam era orde baru dikenal sebagai sistem *cukongisme* (Supriyatna, 1996:64). Cukong adalah istilah Cina (*Hokkien*) yang berarti majikan. Di Indonesia istilah ini dipakai untuk menunjuk pengusaha Tionghoa yang terampil, bekerja sama secara erat dengan mereka yang berkuasa, khususnya militer sebagai perantara.

Orientasi Orde Baru pada ekonomi membutuhkan penciptaan basis investasi yang luas dan bersifat massal. Dalam hal ini yang memenuhi syarat untuk menghimpun modal hanyalah golongan etnis Cina karena lemahnya struktur modal yang dimiliki oleh para pengusaha pribumi. Pemerintah Soeharto benar-benar memberikan fasilitas dan proteksi untuk kemajuan bisnis beberapa tokoh Cina, misalnya Sudono Salim. Motif dibalik program pemerintah tersebut adalah untuk mengerahkan potensi ekonomi Cina di Indonesia dan dengan demikian mendorong mereka menarik lebih banyak modal dari Singapura, Hongkong, dan pusat-pusat bisnis Cina perantauan di Asia. Segala fasilitas pemerintah yang menguntungkan mempercepat kebangkitan kembali dominasi Cina dalam ekonomi Indonesia dan mendepak perusahaan-perusahaan pribumi (Mas' oed, 1989:99). Kebijakan ini dilatarbelakangi kepentingan politik dan ekonomi yang tampak sebagai upaya untuk menyangga dan melanggengkan kekuasaannya. Sukses ekonomi warga etnis Cina pada masa Orde Baru akibat kebijakan yang diterapkan pemerintah telah melahirkan sejumlah konglomerat. Akibatnya sentimen anti-Cina muncul kembali. Misalnya pada Januari 1974 terjadi demonstrasi massa anti-Cina dan anti-Jepang.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan metafora dalam "Produk Cina" dijadikan sebagai 'alat' oleh media untuk melancarkan proses sosial ideologi nasionalisme, yaitu faham untuk mencintai bangsa, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsanya. Baik *Media Indonesia* maupun *Kompas* menggunakan

metafora yang sama yaitu metafora negatif terhadap produk dari Cina. Jarang sekali terdapat metafora yang positif yang diungkap oleh kedua media tersebut, terbukti dengan digunakannya kata-kata seperti: *rontok, serbuan, dominasi, pasung, kacaukan, banjir, tergilas, bombardir, dan menjamur*.

Dilihat dari segi praktik kewacanaan *Media Indonesia* dan *Kompas*, memiliki latar belakang yang sama yaitu nasionalis, namun *Kompas* lebih berpihak kepada kebijakan pemerintah, lain halnya dengan *Media Indonesia* agak cenderung melihat kebijakan pemerintah sebagai suatu kelemahan dalam menghadapi derasnya produk Cina di dalam negeri. Dari segi pembaca umumnya kedua media mengoptimalkan pembaca yang masih berumur produktif dan memiliki pendidikan rata-rata cukup tinggi.

Dari segi analisis praktik sosial, analisis lebih diarahkan kepada perkembangan perekonomian etnis Cina pada tiap periode pemerintahan di Indonesia. Dapat disimpulkan etnis Cina memiliki kelebihan yang sangat besar dari segi perekonomian dan bahkan bisa dikatakan lebih maju dari penduduk pribumi, namun kemajuan etnis Cina tersebut mendapatkan rintangan yang sangat besar pada tiap periode pemerintahan saat itu. Warga Negara Indonesia etnis Cina telah memiliki beban sejarah dan beban mitos dalam kehidupannya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial dan otoriter telah menerapkan politik ras atas nama etnis, nasionalisme maupun pembangunan. Akibatnya muncul sentimen rasial dalam kehidupan bernegara. Sikap rasialis juga berkembang karena adanya prasangka-prasangka yang hidup dalam masyarakat, misalnya bahwa orang Cina itu hidup secara eksklusif dan memiliki sikap oportunistis. Hal ini terus berkembang pada setiap periode pemerintahan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Charteris-Black, J. 2004. *Corpus Approaches to Critical Metaphor Analysis*. New York: Palgrave Macmillan.
- Coppel, Charles.A. 1994. *Tionghoa Indonesia*

- Dalam Krisis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Fairclough, Norman. 1989. *Language and Power*. London: Longman.
- , 2003. *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research*. London: Routledge.
- Faridah Ibrahim & Emma Mirza Wati Mohamad. 2005. War heroes, Terrorists, freedom fighters and fragile economy; from metaphor to "WMDs". *Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication*, 21: 121-134.
- Kwartanada, Didi. 1996. "Minoritas Cina dan Fasisme Jepang: Jawa, 1942-1945", Lembaga Studi Realino (ed.), *Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Cina*, Yogyakarta: Kanisius dan Lembaga Studi Realino.
- Knowles, Murray dan Rosamund Moon. 2006. *Introducing Metaphor*. New York: Routledge.
- Lakoff, George and Johnson, Mark. 1980. *Metaphors We Live*. Chicago: Chicago University Press.
- Mackie, J.A.C. 1976. "Anti Chinese Outbreak in Indonesia 1959-1968", dalam *The Chinese in Indonesia: Five Essays*. Melbourne: Thomas Nelson Ltd.
- Mahsun, 2005. *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mas' oed, Mohtar. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, Jakarta: LP3ES.
- Pattiradjawane, Rene. L. 2001. "Peristiwa Mei 1998 di Jakarta: Titik Terendah Sejarah Orang Etnis Cina di Indonesia, dalam I. Wibowo (ed.), *Hargayang Harus Dibayar: Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Phillips, Louise and Marianne W. Jorgensen. 2002. *Discourse Analysis as Theory and Method*. London: SAGE Publication ltd.
- Suhandinata, Justian. 2009. *WNI Keturunan Cina dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Susanto, Budi. 1996. "Rekayasa Kekuasaan Ekonomi (Indonesia 1800-1950): Siasat Pengusaha Tionghoa", dalam Lembaga Studi Realino (ed.), *Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa*, Yogyakarta: Kanisius.
- Wahab, Abdul. 1995. *Isu Linguistik: Pengajaran Bahasa dan Sastra*. Surabaya: Airlangga University Press.